

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan membutuhkan dana untuk kelancaran usahanya. Dana yang dibutuhkan tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk keperluan modal kerja dan investasi. Modal kerja, yaitu modal yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, seperti membayar beban air, telepon, listrik, pembelian bahan baku, dan pengeluaran lainnya. Modal kerja biasanya digunakan untuk kegiatan rutin perusahaan dan bersifat jangka pendek. Sementara, modal investasi dibutuhkan perusahaan untuk jangka panjang, seperti membangun gedung, pabrik, membeli mesin-mesin, dan modal investasi lainnya. Kedua jenis modal ini memiliki peranan yang sama penting.

Dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan modal kerja dan investasi bersumber dari pemilik usaha itu sendiri maupun dari modal pinjaman atau utang. Secara umum kedua jenis sumber modal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kendala yang cukup besar terkadang dialami oleh pemilik perusahaan dalam pemenuhan dana, terutama untuk jumlah yang relatif besar dan bersifat harus segera dipenuhi atau mendesak. Untuk hal-hal tertentu, pemenuhan dana yang bersumber dari pemilik perusahaan itu sendiri tidak menjadi masalah, misalnya dalam jumlah yang tidak terlalu besar

dan memiliki waktu pemenuhan yang tidak mendesak. Namun, jika kebutuhan dana dalam jumlah yang relatif besar, sementara pemenuhan dana tersebut tidak tersedia, jalan keluarnya adalah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan di luar perusahaan.

Pemenuhan dana yang bersumber dari pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dari modal sendiri, selama memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Hanya saja, pinjaman dana dari lembaga keuangan memiliki beban bunga yang harus dibayar. Besarnya beban bunga ini tergantung dari kebijakan kreditor sebagai pemberi pinjaman, jangka waktu pinjaman, jaminan, dan faktor lainnya. Dalam menyalurkan dananya, lembaga keuangan sebagai kreditor memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Setiap pengajuan kredit yang disetujui akan dinilai melalui semua persyaratan yang diajukan. Bagi kreditor hal ini penting agar dana yang dikucurkan tidak mengalami risiko gagal bayar (*default risk*). Oleh karena itu, dalam memberi pinjaman, kreditor terlebih dahulu mengestimasi *default risk* yang ada di dalam perusahaan. *Default risk* adalah kemungkinan perusahaan tidak mampu atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban utangnya.

*Default risk* menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi banyak lembaga keuangan, terutama bank menjadi terpuruk karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar. Misalnya saja saat Pemilihan Umum Calon Legislatif di Indonesia, tidak sedikit calon anggota legislatif (caleg) partai politik mencari dana kampanye dari perbankan. Karena mereka belum tentu terpilih, akhirnya ada yang tidak bisa melunasi kreditnya, sehingga setiap pemilu selalu

ada bank yang mengalami masalah dan akhirnya bangkrut (Husein, 2013). Kasus itu misalnya Bank Bali pada 2004, lantas Bank Century pada 2008.

Kenaikan tingkat utang korporasi di Asia juga bisa memicu kekhawatiran investor, pasca kasus gagal bayar utang salah satu konglomerat Portugal. Ketidakmampuan konglomerat Portugal Espirito Santo International untuk membayar utang jangka pendeknya memperbesar kekhawatiran terhadap salah satu unit bisnisnya, Banco Espirito Santo. Salah satu bank terkemuka di Portugal itu kemungkinan akan mengalami gagal bayar utang-utangnya (Verstraete, 2014).

Fenomena *default risk* juga terlebih dahulu terjadi pada Bank Reserve yang ada di Australia. Bank Reserve yang dibentuk pada 14 Januari 1960 ini membuat regulasi yang lebih terbuka dibanding bank lain saat itu. Bank Reserve memberikan peraturan baru, yaitu pinjaman tidak lagi hanya terbatas kepada para pemilik sertifikat tanah, tetapi mulai mencakup banyak kelas masyarakat. Sayangnya sistem yang diperkenalkan oleh Bank Reserve ini lambat laun mulai mengalami kesalahan pengalokasian (*misallocated*) sistem kredit. Kucuran dana diberikan kepada setiap nasabah tanpa memperhitungkan risiko yang diperoleh. Akibatnya banyak kredit justru diberikan kepada ratusan ribu imigran asing yang berstatus sebagai pekerja pendatang. Kredit tersebut ternyata justru menambah deretan masalah bagi sistem perbankan di Australia. Banyak terjadi gagal bayar karena misalokasi dana kredit sehingga mengakibatkan lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah Australia mencoba untuk mengatasinya dengan menyuntikkan dana ke berbagai lembaga pembiayaan di Australia. Namun hal tersebut tidak banyak membantu, kasus gagal bayar ini semakin membesar hingga

menyebabkan sektor riil di Australia pun menjadi lumpuh (Myers, Margaret G, 1961)

Dengan melihat kasus-kasus tersebut, maka kreditor membutuhkan suatu perlindungan dalam melakukan transaksi perjanjian pinjaman. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa biaya pinjaman, perjanjian pinjaman, jaminan, pembatasan utang, dan lain-lain (Chu dkk, 2009 dalam Nursetyorini dan Dul Muid, 2012).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap pinjaman yang dikeluarkan oleh kreditor yang menjadi banyak perhatian adalah *cost of loan*. *Cost of loan* adalah biaya yang diberikan kepada perusahaan atau debitor atas pinjaman yang diberikan. *Cost of loan* dapat dihitung berdasarkan besarnya suku bunga pinjaman (Francis dkk, 2005 dalam Nursetyorini dan Dul Muid, 2012). Besarnya *cost of loan* biasanya tergantung dari *default risk* perusahaan. Jika *default risk* perusahaan rendah, maka perusahaan akan menikmati *cost of loan* yang rendah pula, begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan, perusahaan yang memiliki *default risk* rendah akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari kreditor, sehingga kreditor akan meminta *return* yang lebih rendah.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya *default risk* agar mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari kreditor, salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas tindakan *monitoring* yang ada di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, tindakan *monitoring* yang dimaksud adalah meningkatkan mekanisme *good corporate governance*, meningkatkan kualitas audit atas laporan

keuangan perusahaan, dan meningkatkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* akan mengurangi *default risk* dengan cara mengurangi biaya keagenan, yaitu dengan memonitor kinerja manajer dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan kreditor (Bhojraj dan Sengupta, 2003). Biaya keagenan adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Nursetyorini dan Dul Muid, 2012). Dalam penelitian ini, pengukuran variabel *corporate governance* akan difokuskan dalam dua hal, yaitu proporsi kepemilikan institusional dan proporsi kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, dalam hal ini investor institusional tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Rachmawati dan Triatmoko 2007 dalam Nursetyorini dan Dul Muid, 2012).

Cornett dkk (2006) dalam Nursetyorini dan Dul Muid (2012) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku

manajemen. Hal ini disebabkan karena dengan adanya tindakan pengawasan tersebut dapat mendorong manajemen untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau perilaku mementingkan diri sendiri. Shleifer dan Vishny (1997) dalam Nursetyorini dan Dul Muid (2012) menyatakan bahwa investor institusional memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sistem *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan, dalam hal ini mereka dapat secara independen mengawasi tindakan manajemen dan memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, membuat manajemen akan berusaha untuk mewujudkannya sehingga membuat risiko perusahaan semakin kecil di mata kreditor dan akhirnya kreditor hanya meminta *return* yang kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Piot dan Monsierra (2007) menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* di dalam sebuah perusahaan mempengaruhi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan investasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kualitas *good corporate governance* terhadap *cost of debt*. Beberapa penelitian lain yang meneliti hubungan antara *corporate governance* dan biaya utang (misalnya Chu

dkk, 2009; Piot dan Missonier-Piera, 2007) memberikan bukti bahwa, pada umumnya perusahaan dengan mekanisme *coprporate governance* yang kuat mengeluarkan biaya pinjaman yang lebih rendah.

Kualitas audit di sebuah perusahaan juga mempengaruhi keputusan kreditor dalam penentuan besarnya *cost of loan*. Kualitas audit yang baik memberikan risiko informasi yang lebih rendah (Teoh dan Wong, 1993 dalam Nursetyorini dan Dul Muid, 2012). Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit sehingga dapat membantu manajemen untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan informasi dan dapat mengurangi asimetri informasi dan *default risk*.

Ungkapan laporan keuangan bermanfaat memberi petunjuk dan fasilitas untuk para investor dan pengguna dalam membuat keputusan ekonomi agar terarah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi ungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam jumlah tambahan informasi yang mereka ungkap kepada pasar modal (Murni, 2004 dalam Setiani dan Kusbandiyah, 2011). Penelitian Nikolaev dan Lent (2005) dalam Setiani dan Kusbandiyah (2011) menemukan hubungan yang negatif signifikan dan kuat antara tingkat *disclosure* dengan *cost of debt* dalam hal ini perusahaan yang kurang transparan dipandang lebih berisiko daripada perusahaan yang lebih

transparan. Penelitian Sidarta dan Juniarti (2003) dalam Setiani dan Kusbandiyah (2011) tentang pengaruh kualitas *disclosure* terhadap biaya utang, dengan menganalisis laporan keuangan dan *disclosure* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas *disclosure* terhadap biaya utang.

Tidak selamanya bahwa *disclosure* yang tinggi akan menurunkan biaya utang. Hal yang sebaliknya dapat terjadi, ketika perusahaan ternyata mempunyai banyak “masalah”, maka dengan tingkat *disclosure* yang tinggi, semakin banyak informasi yang riskan akan diketahui oleh investor sehingga investor meminta *return* yang tinggi dan akibatnya tingkat biaya ekuitas yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin tinggi (Juniarti dan Yunita, 2003 dalam Setiani dan Kusbandiyah, 2011).

Jukka (2008) dalam Walandouw dkk (2014) yang meneliti hubungan antara pemilihan auditor dengan biaya pinjaman pada perusahaan kecil dan menengah menemukan bahwa pilihan auditor bersertifikat dan biaya pinjaman berpengaruh negatif. Hasil berkebalikan diungkapkan Pittman dan Fortin (2004) dalam Walandouw dkk (2014) yang menemukan pilihan auditor berpengaruh terhadap biaya pinjaman. Piot dan Piera (2007) dalam menemukan hasil bahwa *corporate governance* ternyata memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi efek pada biaya pinjaman, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap biaya pinjaman. Hasil penelitian Sentosa (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman.

Sementara itu, komisaris independen, kepemilikan manajerial, *voluntary disclosure*, dan variabel kontrol lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman.

Robert dan Yuan (2006) dalam Walandouw dkk (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya pinjaman bank. Hasil penelitian Nursetyorini (2012) menunjukkan kepemilikan institusional dan jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya pinjaman bank, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh pada biaya pinjaman bank. Mansi dkk. (2004) dalam Walandouw dkk (2014) menemukan hasil berupa pengaruh antara kualitas auditor serta masa penugasan audit terhadap biaya pinjaman kemudian adanya hubungan antara karakteristik auditor dan biaya utang di perusahaan dengan pinjaman non investasi. Sementara itu, Kim dkk. (2005) dalam Walandouw dkk (2014) menyatakan bahwa besarnya pengaruh antara kualitas audit dan masa penugasan audit (*audit tenure*) terhadap biaya pinjaman bank bergantung pada besarnya level kredit yang diajukan perusahaan.

Penelitian tentang *good corporate governance*, kualitas auditor, dan *voluntary disclosure* telah banyak dilakukan. Namun belum banyak yang meneliti tentang hubungan ketiganya dengan *cost of loan*. Selain itu, belum efektifnya aktivitas tata kelola di banyak perusahaan di Indonesia dan masih banyaknya isu terkait kualitas audit dan *voluntary disclosure* menjadikan penelitian mengenai *good corporate governance*, kualitas audit dan *voluntary disclosure* masih sangat

menarik untuk diteliti. Penelitian ini juga perlu dilakukan karena sistem *corporate governance*, audit yang berkualitas, dan tingginya pengungkapan sukarela memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga dengan mengetahui informasi-informasi tersebut investor akan memperoleh keyakinan akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Kantor Akuntan Publik, *Audit Tenure*, dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Loan*”**. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai mekanisme *good corporate governance*, sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit tenure* sebagai mekanisme kualitas audit. Penelitian ini akan meneliti mengenai *cost of loan* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan seringkali terkendala dalam pemenuhan modal yang besar.
2. Dalam menanamkan dana kepada debitor, lembaga keuangan menghadapi kemungkinan terjadinya *default risk* (gagal bayar atau macet).

3. *Default risk* menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi banyak lembaga keuangan terutama bank menjadi terpuruk karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar.
4. Dalam memberikan pinjaman, kreditor tidak ingin pinjaman yang diberikan justru menjadi beban bagi perusahaan atau debitor yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.
5. Lemahnya *monitoring* dari kepemilikan institusional dapat menurunkan kinerja perusahaan yang menyebabkan *return* yang dikenakan oleh kreditor akan relatif lebih tinggi.
6. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham, sedangkan manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
7. Kualitas audit yang kurang baik dapat menurunkan kepercayaan kreditor kepada perusahaan sehingga akan mengenakan *return* yang lebih tinggi.
8. *Disclosure* yang tinggi tidak selamanya akan menurunkan biaya utang, ketika perusahaan ternyata mempunyai banyak “masalah”, maka dengan tingkat *disclosure* yang tinggi, semakin banyak informasi yang riskan akan diketahui oleh kreditor sehingga menimbulkan *return* yang tinggi.

### C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran KAP, Audit Tenure, dan Voluntary Disclosure terhadap Cost of Loan**. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *cost of loan*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *cost of loan*?
3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *cost of loan*?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *cost of loan*?
5. Apakah *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap *cost of loan*?
6. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *voluntary disclosure* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *cost of loan*?

### E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti mengenai hubungan antara variabel-variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *voluntary disclosure* terhadap *cost of loan*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepada para civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai biaya pinjaman.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan yang memiliki sumber modal dari pinjaman lembaga keuangan sehingga dapat dilakukan strategi agar dapat membayar bunga rendah sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kreditor dalam menentukan biaya pinjaman yang akan dikenakan kepada debitor.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam pengembangan profesi auditor, khususnya dalam meningkatkan ukuran Kantor Akuntan Publiknya dan dalam pengaturan masa perikatan audit dengan klien.